BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau (Depkes RI, 2009). Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah keadaan sehat utuh secara fisik, mental dan sosial sehingga manusia dapat bekerja dan melakukan kegiatan secara produktif. Salah satu penunjang kesehatan manusia adalah ketersediaan obat pada sarana pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dalam ketersediaannya obat sebagai salah satu penunjang kesehatan manusia diperlukan suatu kontrol terhadap jumlah dan kualitas sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhannya dalam hal kesehatan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu badan yang dapat mengontrol ketersediaan obat pada pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Industri Farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang

Industri Farmasi, yang dimaksud dengan industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat yang diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuatan obat di industri farmasi diatur secara ketat

Dalam menjalankan usaha pembuatan obat atau bahan obat, suatu Industri Farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai acuan bagi Industri Farmasi dalam membangun kualitas obat mulai dari desain (*quality by design*). Kualitas obat yang baik ditunjang mulai dari sarana prasarana yang memadai dan terqualifikasi serta proses pembuatan obat dan analisa yang tervalidasi. Pemenuhan kualitas yang dilakukan mulai dari desain akan menggambarkan kualitas dari sediaan obat sampai dengan obat tersebut dipasarkan dan diterima oleh masyarakat, dalam hal ini Industri Farmasi harus mampu membuat obat secara konsisten dan reproduibel dengan memenuhi 3 aspek yang dipersyaratkan, yaitu *quality*, *safety* dan *efficacy*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Apoteker dalam Industri Farmasi, Industri Farmasi paling sedikit harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab pada bagian produksi (*manufacturing*), bagian pemastian mutu (*quality assurance*), dan bagian pengawasan mutu (*quality control*). Ketiga bagian tersebut (produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu) harus dipimpin oleh orang yang berbeda

yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan perannya.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dengan demikian peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri farmasi sangat penting dan dibutuhkan. Sebagai calon Apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran didalam kelas, namun juga seorang Apoteker harus mengikuti program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri farmasi. Hal ini bertujuan agar calon Apoteker dapat mengetahui kondisi dilapangan dan berbagi pengalaman dengan Apoteker praktisi yang bekerja di Industri Farmasi.

Oleh karena itu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari program studi profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA minor yang dilakukan secara *daring* dari tanggal 19 April – 20 Juni 2021 dikarenakan adanya wabah virus Covid-19, diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten dan profesional di kemudian hari.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun Tujuan dari kegiatan PKPA secara *daring* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab dan peran Apoteker di Industri farmasi.
2. Mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri farmasi.
3. Memberikan gambaran dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
4. Membekali calon Apoteker dengan ilmu pengetahuan di Industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari PKPA Industri dengan metode *daring* adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi.
4. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.